

Analisis Dampak Pasca Pemekaran Daerah di Provinsi Papua Barat Daya

Aditya Wahyu Saputra ^{1*}, Shahibunnahar Shahibunnahar ², Putri Febriyanti ³, Nur Aida Irsyada ⁴, Omi Omi ⁵

¹⁻⁵ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: hadditiaadit020@gmail.com ¹, shahibunnahar01@gmail.com ², putrifebriyanti1205@gmail.com ³, nurirsyadaaida@gmail.com ⁴, omio6877@gmail.com ⁵

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis : hadditiaadit020@gmail.com *

Abstrack, *Regional expansion is a local political action by expanding or reducing subdivisions of regional areas, whether new provinces, districts/cities, to improve public services and community welfare. The object used as focus in this research is Southwest Papua Province. The purpose of this writing is to analyze the impact of post-regional expansion in Southwest Papua Province. The method used in this research is a qualitative research technique with a literature study approach. The research results show that regional expansion in Southwest Papua Province has implications for community welfare, employment, human development and the economy.*

Keyword: *Impact of Expansion, Regional Expansion, Southwest Papua*

Abstrak, Pemekaran daerah adalah suatu tindakan politik lokal dengan cara memperluas atau mengurangi subbagian wilayah daerah baik provinsi, kabupaten/ kota baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah dampak pasca pemekaran Papua Barat Daya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pasca pemekaran daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Provinsi Papua Barat Daya memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, dan perekonomian.

Kata Kunci: Dampak Pemekaran, Pemekaran Daerah, Papua Barat Daya.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai berbagai macam budaya & dan luas wilayah seperti provinsi, kabupaten/ kotah bahkan desa,dalam mengelola pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi yaitu suatu sistem yang menekankan bahwa pemerintahan itu berada di pusat. Akan tetapi, sistem sentralisasi tersebut dilihat tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan setiap daerah di Indoensia. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi tersebut merupakan suatu sistem pemerintahan yang melimpahkan wewenang dan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Wasistiono, 2020). Penerapan sistem desentralisasi tersebut tentunya membuat beberapa daerah seperti desa, kabupaten/kota, bahkan provinsi menerapkan otonomi daerah dan menjadi

daerah otonomi. Salah satu bentuk dari Implementasi sistem desentralisasi yaitu adalah pemekaran daerah.

Pemekaran daerah adalah suatu tindakan politik lokal dengan cara memperluas atau mengurangi subbagian wilayah daerah baik provinsi, kabupaten/ kota baru.(Herawati, 2013). Pemekaran daerah merupakan upaya untuk memaksimalkan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai alat pendidikan politik lokal. Terhadap beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemekaran daerah yaitu dari ekonomi, potensi daerah, luas daerah, kependudukan, sosial politik dan budaya, pertahanan dan keamanan yang dapat membantuk suatu daerah tersebut dapat dimekarkan. (Kusuma & Sintasari, 2023). Adapun hukum yang menjadi pedoman pemekaran daerah adalah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah tersebut adalah memecahkan atau menggabungkan suatu daerah menjadi satu daerah tertentu atau menjadi dua atau lebih daerah tertentu.(Lelyana & Sarjito, 2024).

Pemekaran daerah dikutip dalam (Kambuno, 2017) harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan dasar dan administratif. *Persyaratan dasar* pertama adalah syarat dasar kewilayahan, dan syarat dasar kedua adalah kapasitas daerah. *Persyaratan kedua*, adalah persyaratan administratif, yang terdiri dari syarat administratif untuk pembentukan dan persiapan provinsi, kabupaten, dan kota, serta syarat administratif untuk pembentukan dan persiapan kota.

Pada tahun 2024 jumlah provinsi, kabupaten/kota Indonesia pasca pemekaran jumlah provinsi mencapai 38 dan 515 kabupaten/kota (Iki, 2024). Kemudian total 7.277 kecamatan/distrik, 83.763 desa/kelurahan (Nomornet, 2024). Berdasarkan jumlah total 38 Provinsi yang ada di Indonesia, tentunya masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi sumberdaya yang beragam. Salah satunya provinsi yang baru mekar yaitu Papua Barat Daya pada tahun 2022.

Pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya telah di usulkan sejak tahun 2014 oleh DPD-RI yang menyarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai UU, seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Nomor 46/DPD. Namun, pada tahun 2014, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menolak pemekaran provinsi di Papua. (Lili S, 2023). Sebelum Papua dimekarkan untuk menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, sudah ada rekomendasi untuk menjadikan Papua Barat Daya menjadi provinsi terlebih dahulu. Ini dideklarasikan pertama kali di Kota Sorong pada tanggal 5 Januari 2007, tetapi diputuskan ulang pada 12 Januari 2007 di Jayapura.(Nugraha, 2022). Berbagai Putra putri yang berasal dari Papua Barat Daya serta

Putra-Putri dari penjuru Nusantara terutama pada Sorong Raya telah membuat pernyataan tersebut. Perjuangan untuk membentuk Papua Barat Daya benar-benar muncul di tahun 2009 pada saat RUU Pembentukan Papua Barat Daya dimasukkan kedalam 33 RUU prioritas yang dibahas di DPR RI. Akan tetapi, Ketika 19 RUU DOB dibahas pada tahun 2012-2014, Proposal tersebut ternyata tidak dimasukkan. Rekomendasi gubernur Papua Barat belum ada dan membuat pembenahan Provinsi ini tertunda. Pada akhirnya setelah berproses akhirnya Provinsi Barat Daya telah disahkan sebagai Pemerintah oleh DPR RI menurut Rancangan Undang-Undang.(Tampubolon, 2024) . Kejadian tersebut berkaitan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Provinsi Barat Daya akhirnya terbentuk UU Nomor 29 tahun 2022 mengenai Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.(PANRB, 2022).

Oleh sebab itu, penelitian kali ini akan membahas salah satu Provinsi di Indonesia yaitu adalah Provinsi Papua Barat Daya yang sah dimekarkan pada 8 Desember 2022 yakni UU No 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Papua Barat Daya adalah bentuk dari hasil dimekarkannya Provinsi Papua Barat. Adapun Tujuan Papua Barat Daya dimekarkan Provinsi adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

Berdasarkan latarbelakang diatas, tentunya menjadi hal yang menarik untuk di amati. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis Provinsi Papua Barat Daya setelah dimekarkan dari Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2022 dalam artikel yang berjudul **“Analisis Dampak Pasca Pemekaran Daerah di Provinsi Papua Barat Daya”**

2. KAJIAN TEORITIS

Pemekaran Daerah

Menurut (Herawati, 2013) pemekaran daerah merupakan proses administratif yang dilakukan untuk membagi suatu wilayah menjadi daerah yang lebih kecil atau baru, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut (Suaib, 2020) pemekaran daerah adalah suatu kegiatan politik sbuah daerah yang dilakukan dengan cara membagi atau memperluas suatu wilayah tertentu.

Menurut Juanda dalam (Tenrini, 2013) pemekaran suatu daerah memiliki tujuan yaitu untuk mejudukan profesionalisme pemerintah daerah saat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kesempatan yang besar bagi masyarakat serta akses terhadap unit pelayanan publik yang tersedia.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut (Amba et al., 2023) pelayanan publik merupakan suatu indikator yang utama hal ini dikarenakan pelayanan publik dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut AS Moenir dalam (Huda, 2019), Pelayanan umum adalah upaya kelompok, individu, atau birokrasi untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik bertujuan memenuhi dan memuaskan masyarakat atau pelanggan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik ini memanfaatkan buku, artikel dan jurnal sebagai sumber referensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil dari dimekarkannya wilayah Papua Barat oleh DPR RI 8 Desember 2022 . Pasca pemekaran Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 6 daerah bawah yaitu, Kabupate Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Raja Ampat. Provinsi Papua Barat Daya memiliki luas wilayah dengan total 39.122,92 Km². Geografi Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

- Samudra Pasifik, Filipina, Palau, sebelah utara.
- Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari sebelah timur.
- Maluku Utara dan Provinsi Maluku sebelah Barat.
- Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Fakfak sebelah selatan.

Terdapat tiga tujuan penting dalam pemekaran Papua Barat Daya yaitu pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari BPS Papua Barat Daya dengan laporan Statistik Daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 yang ditulis oleh (Airori, 2024) yaitu:

Pelayanan Publik

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang penting untuk tercapainya masyarakat yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah melakukan upaya dengan memfasilitasi wajib belajar 12 tahun yang merupakan program pemerintah pusat. Oleh karena itu, Provinsi Papua Barat Daya berupaa untuk selaras dengan program tersebut dengan cara menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga pengajar.

Tabel 1. Statistik Pendidikan Papua Barat Daya Tahun Ajaran 2023/2024

Kriteria	SD/MI	SMP	SMA
Jumlah Unit	547	181	72
Jumlah Murid	60.227	24.650	14.260
Jumlah Guru	5.193	2.638	1.362

Berdasarkan tabel data diatas yang diperoleh dalam BPS Provinsi Papua Barat tahun 2024 terlihat bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah berusaha untuk meningkatkan aspek pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya dengan cara menyediakan sarana dan prasarana seperti sekolah dan guru pengajar. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Papua Barat Daya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Papua Barat Daya yang berkualitas. Kemudian untuk melihat besaran tingkat partisipasi penduduk pada batas usia tertentu dapat dilihat dari APM. Sementara APK dimanfaatkan untuk melihat besarnya tingkat partisipasi yang bersekolah di jenjang tertentu. Untuk APM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni Kab/Kota di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023

No	Kab/Kota	APM SD	APM SMP	APM SMA
1	Raja Ampat	93,54	51,18	49,40
2	Sorong	95,25	76,04	68,34
3	Sorong Selatan	96,27	61,51	57,89
4	Tambrau	94,18	65,93	49,31
5	Maybrat	96,97	88,74	66,76
6	Kota Sorong	92,80	81,86	75,59

Tabel 3 Angka Partisipasi Sekolah Kab/Kota di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023

No	Kab/Kota	APS 7-12 thn	APS 13-15 thn	APS 16-18 thn
1	Raja Ampat	97,53	97,27	67,79
2	Sorong	98,53	98,56	88,22
3	Sorong Selatan	98,76	98,09	78,88
4	Tambrau	96,80	97,03	81,27
5	Maybrat	98,45	96,73	80,53
6	Kota Sorong	99,49	97,37	81,86

Berdasarkan kedua tabel tersebut yaitu APM dan APS, dapat dilihat bahwa semakin naik jenjang pendidikan maka nilai APM dan APS akan cenderung menurun. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Papua Barat Daya untuk mengatasi potensi munculnya persentase angka putus sekolah di Kabupaten/kota di provinsi Papua Barat Daya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada aspek pembangunan pendidikan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDm sudah cukup baik karena telah disediakan beberapa sarana dan prasarana pendidikan. Hanya saja yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Papua Barat Daya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi APM dan APS di setiap jenjang pendidikan.

b. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan suatu yang menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat setempat. Hal yang menjadi pendukung dalam aspek kesehatan adalah fasilitas sarana kesehatan, tenaga medis, bahkan kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Pada bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya masih tergolong sangat rendah dan belum mencukupi untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kesehatan masyarakat.

Tabel 4. Jumlah fasilitas kesehatan di Papua Barat daya tahun 2023

Kategori	Jumlah
Rumah sakit umum	12
Puskesmas tanpa rawat inap	102
Puskesmas Rawat Inap	15

Berdasarkan tabel di atas, adapun fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah 12 unit rumah sakit umum, 102 unit puskesmas tanpa rawat inap, dan 15 unit puskesmas rawat inap. Jumlah penyediaan rumah sakit sudah cukup merata, karena disetiap kab/kota di Papua Barat Daya telah memiliki 1 Rumah Sakit umum.

Tabel 5. Jumlah tenaga kesehatan di Papua Barat Daya tahun 2023

Kategori	Jumlah
Dokter Umum	145
Dokter spesialis	56
Dokter gigi	39

Sementara untuk penyediaan tenaga medis Pemprov Papua Barat Daya terdiri dari 145 dokter umum, 56 dokter spesialis, dan 39 dokter gigi. Untuk menjamin kesehatan masyarakat Papua Barat Daya pemerintah memberikan Program berupa jaminan kesehatan seperti:

Tabel 6. Persentase Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya

Program	Daerah	Persentase
BPJS PBI	Raja Ampat	70,54%
	Tambrau	37,15%
BPJS NON PBI	Kota Sorong	21,60%
	Raja Ampat	4,71%
JAMKESDA	Tambrau	24,49%
	Kota Sorong	0,90%
Perusahaan/Kantor	Kota Sorong	4,49%
	Raja Ampat	0,36%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Pemerintah telah berusaha untuk memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat Papua Barat Daya dengan memberikan beberapa program di Provinsi Papua Barat Daya berupa program BPJS PDI, BPJS NON PBI, JAMKESDA, Perusahaan/Kantor.

Infrastruktur

a. Jalan

Salah satu hal yang sangat diperlukan oleh suatu wilayah untuk akses transportasi adalah jalan. Jalan di Provinsi Papua Barat Daya yaitu memiliki panjang mencapai 1.515,39 km yang terbagi menjadi 549,21 km jalan dengan kategori baik, 317,77 km dengan kategori

sedang, 53,75 km dengan kategori buruk, dan 594,67 km dengan kategori sangat buruk. Panjang jalan yang negara yang terpanjang di Provinsi Papua Barat Daya berada di Kabupaten Tambrauw yaitu dengan panjang 532,98 km, kemudian terpanjang kedua yaitu Kabupaten Sorong dengan 144,45 km. Kemudian jalan yang terpendek yaitu Kota Sorong dengan panjang 6,36 km dan Kabupaten Raja Ampat sepanjang 18,04 km.

b. Listrik

PLN merupakan sumber penerangan yang digunakan oleh wilayah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kondisi listrik PLN di Provinsi Papua Barat Daya memiliki persentase mencapai 100% di Kota Sorong dan yang paling rendah di Sorong Selatan yaitu sebesar 42,32%.

c. Perumahan

Perumahan merupakan bagian yang paling penting karena merupakan suatu kebutuhan manusia. Khususnya di Papua Barat Daya perumahan mayoritas penduduk yang ada di Papua Barat Daya menempati rumah tinggal yang dimiliki oleh satu anggota rumah tangganya, kurang dari 10% yang menempati rumah dinas, rumah sewa, dan status kepemilikan lainnya. Kondisi perumahan di Papua Barat Daya mencapai 60% rata-rata memiliki fasilitas buang air kecuali Kabupaten Sorong selatan yang hanya 32,21%.

Kesejahteraan Masyarakat

a. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah salah satu hal yang menentukan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu ketenagakerjaan menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah Indonesia sejak lama. Papua Barat Daya memiliki jumlah penduduk mencapai 627.127 jiwa pada tahun 2024, sementara Ketenagakerjaan di Papua Barat Daya pada tahun 2024 jumlah usia kerja sebanyak 465,828 atau 74,27% dan jumlah angkatan kerja berjumlah 314,205 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan yaitu:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Memiliki Pekerjaan di Provinsi Papua Barat Daya

Bekerja	Pengangguran Terbuka
295.236	18.929

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penduduk yang bekerja mencapai 295,236 atau apabila dipersentasekan sebesar 63,73% dari jumlah total angkatan kerja dan

sebanyak 18.929 atau 6,02% yang berstatus pengangguran terbuka. Hal ini melebihi nilai nasional yaitu 4,82%.

b. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan manusia, karena indikator ini dapat dimanfaatkan untuk melihat sampaimana tingkat pembangunan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang besar.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Papua Barat Daya 2021-2023

Kab/Kota	IPM 2021	IPM 2022	IPM 2023
Raja Ampat	64,69	65,41	66,00
Sorong	67,19	63,13	68,89
Sorong Selatan	62,52	63,13	63,98
Tambrau	55,71	56,62	57,53
Maybrat	59,70	60,49	61,29
Kota Sorong	79,01	79,47	80,11

Berdasarkan tabel IPM tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata dalam rentang waktu dari tahun 2021-2023 IPM Papua Barat Daya mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi yaitu terdapat di Kota Sorong yang mencapai 80,11%, dan yang paling rendah dalam 3 tahun terakhir adalah Kabupaten Tambrau yaitu 57,53%.

Perekonomian

a. Pariwisata

Papua Barat Daya memiliki kelebihan tersendiri yaitu daya tarik wisata, seperti wisata di Raja Ampat yang memiliki ciri khas dengan gugusan kepulauannya yang menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini tentunya dapat membantu perekonomian di Papua Barat Daya dengan menyediakan penginapan berupa hotel berbintang dan non berbintang sebanyak 133 unit, dengan ketersediaan kamar 2.732 dan ketersediaan tempat tidur 4.538.

b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertanian, kehutanan, dan perikanan di Papua Barat daya tentunya menjadi faktor pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, Pada sektor pertanian khususnya Padi dalam

tahun 2023 mencapai total Produksi 1.289,3 ton dengan luas panen 332,11 ha. Sementara beberapa tanaman pangan semusim dan tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah tanaman pangan semusim dan tahunan di Papua Barat Daya

Hortikutura Semusim	Jumlah	Hortikutura Tahunan	Jumlah
Cabai Rawit	19.646 Kuintal	Pisang	17.349 Kuintal
Kangkung	18.581 Kuintal	Pepaya	10.458 Kuintal
Bayam	13.540 Kuintal	Durian	6.852 Kuintal

Sementara untuk Perkebunan terdapat dua yang di produksi yaitu Kelapa sebanyak 4.753 ton, dan Kakao sebanyak 1.492 ton. Pada aspek peternakan terdapat tiga yaitu Ternak Ayam Kampung sebanyak 839.834 kg, Ternak Sapi 682.588 kg, dan Ternak Babi sebanyak 572.232 kg. Kemudian pada aspek kehutanan Papua Barat Daya memiliki luas hutan dan perairan mencapai 3.434.940 hektar yang terdiri dari hutan produksi seluas 1.636.538 ha, hutan lindung seluas 769.075 ha, dan wilayah konservasi seluas 1.029.327 ha.

c. Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan di Provinsi Papua Barat Daya terhitung cukup besar, terutama dua wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar yaitu Kabupaten Sorong dan Raja Ampat sebagai daerah penghasil nikel dan gas bumi. Terdapat empat subkategori dalam pertambangan dan penggalian dalam struktur PDRB yaitu termasuk penambangan minyak, gas, dan panas bumi; batu bara dan lignit; biji logam; dan penambangan dan penggalian tambahan. Keempat kategori tersebut yang menjadi mayoritas kegiatan pertambangan dan penggalian yang dilakukan adalah subsektor, gas, minyak, dan panas bumi. Pada penambangan minyak, gas, dan panas bumi pendapatan yang diperoleh Papua Barat daya sebesar 2.007,50 miliar dan Pertambangan Biji Logam sebesar 1.331,78 miliar. Hal ini tentunya membantu pertumbuhan perekonomian di Papua Barat Daya pada hingga mencapai 3.717,47 miliar pada tahun 2023.

5. KESIMPULAN

Papua Barat Daya resmi dibentuk sebagai provinsi pada 8 Desember 2022 bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, tantangan masih ada, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pendidikan

dan ketersediaan fasilitas serta tenaga medis di bidang kesehatan. Jaminan kesehatan juga belum merata di semua kabupaten. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah kesimpulan terkait infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya:

1. Infrastruktur

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan. Di bidang kesehatan, fasilitas dan tenaga medis masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan belum memadai.

2. Pelayanan Publik

Pemekaran daerah khususnya di Papua Barat daya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, namun tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata di semua kabupaten masih ada, dan jaminan kesehatan belum sepenuhnya terdistribusi.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun terdapat kemajuan dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, tantangan tetap ada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan akses kesehatan yang merata, yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Perekonomian

Sektor ekonomi utama di provinsi ini meliputi pariwisata, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dengan potensi besar di nikel dan gas bumi, serta pendapatan dari sektor pertambangan yang diperkirakan mencapai 3.717,47 miliar pada tahun 2023. Meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan-tantangan yang ada masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pemekaran daerah secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

- 1) Pelayanan publik, khususnya pada bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu memperkuat program belajar 12 tahun menggunakan menyediakan lebih baik sarana, prasarana, & energi guru yg berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
- 2) Infrastruktur, Pemerintah perlu melakukan peningkatan infrastruktur kesehatan menggunakan menambah jumlah fasilitas kesehatan & energi medis, yang bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat Papua Barat Daya.

- 3) Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan yang lebih diperlukan oleh masyarakat sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
- 4) Perekonomian, Pemerintah perlu meningkatkan berbagi sektor-sektor ekonomi lokal misalnya pariwisata, pertanian, kehutanan, & perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Amba, N., Saleky, S. R. J., & Sahertian, O. L. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 232–239.
- E.S.Airori, N. (2024). Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 1, 54. <https://Papuabarar.Bps.Go.Id>
- Herawati, N. R. (2013). Pemekaran Daerah Di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370. <https://doi.org/10.37378/Jd.2013.1.359-370>
- Huda, S. D. R. V. S. M. N. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat Di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(2), 170–183. <https://doi.org/10.15642/Japi.2019.1.2.170-183>
- Iki. (2024). Daftar Provinsi Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2024. Lembaga Kajian Indonesia. <https://www.bimtekdiklat.co.id/daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-di-indonesia/>
- Kambuno, H. (2017). Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Herman. 1–203.
- Kusuma, W., & Sintasari, S. A. (2023). Pemekaran Daerah Dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *Capitan: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.47268/Capitan.V1i1.9933>
- Lelyana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara : Studi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45.
- Lili S. (2023). Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal Dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 360–376.
- Nomornet. (2024). Kode Pos 2024 Seluruh Indonesia Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan. Nomor.Net. https://www.nomor.net/_kodepos.php?_I=Provinsi-Kodepos&Daerah=&Jobs=&Perhal=200&Sby=000000&Asc=0000110111&Urut=7
- Nugraha, A. K. E. (2022). Papua Barat Daya: Profil, Potensi, Dan Sejarah Pembentukan. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/D-6412939/papua-barat-daya-profil-potensi-dan-sejarah-pembentukan>

- Panrb. (2022). Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>
- Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia. *Jurnal Government Of Archipelago* (Jgoa), 1(1), 34–44. File:///C:/Users/Personal/Downloads/Kinerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pdf
- Tampubolon, N. S. Dan M. (2024). Kabupaten Maybrat Surga Milik Indonesia. In Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
- Tenrini, R. H. (2013). Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar. Pusat Kebijakan Apbn, Bkf, 2009, 1–9.
- Wasistiono, S. (2020). Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought Of Decentralization Theories). Dapu6104 Modul 1, 1, 576. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6104-teori-pemerintahan-daerah/>